





















dengan dasar Islam. Maka dari sinilah munculnya periode ideologi.

Di pondok pesantren tempat sosialisasi agama Islam, para kiyai berupaya memasukkan ajaran fiqh sebagai ajaran untuk bahan kajian setelah tasawuf. Dalam kajian pengajaran fiqh di pondok pesantren diajarkan alat-alat untuk mempelajarinya yaitu nahwu dan sharaf (tata bahas Arab). Karena kitab-kitab yang dipelajari semuanya berbahasa Arab, yaitu apa yang disebut kitab kuning. Dalam memberikan pelajaran kiyai menuntun para santrinya untuk membaca dengan menjenggoti atau memberikan makna satu persatu terhadap lafadh kitab kuning tersebut.<sup>21</sup>

Orientasi fiqhiyah ini menimbulkan permasalahan setelah berhadapan dengan fiqh dalam konteks keindonesiaan. Masalah tersebut menimbulkan polemik berkepanjangan antara ulama satu dengan yang lain, antara organisasi satu dengan yang lain di Indonesia. Misalnya antara Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.

Ditambah lagi negara Indonesia bukanlah negara Islam, secara otomatis hukum yang berlaku di Indonesia bukanlah hukum Islam, tetapi hukum yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Walaupun umat Islam menempati posisi mayoritas, hukum Islam tidak berlaku di Indonesia. Misalnya potong tangan bagi pencuri,

<sup>21</sup> Samahsari Dofier, *Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. LP3ES, Jakarta, 1994, hal.28-29.





umat Islam dalam bidang politik dengan dalih : Negara dalam keadaan darurat perang.<sup>28</sup> Akan tetapi pada tahun 1943, Jepang mendorong tumbuhnya organisasi sosial keagamaan dan politik yaitu Masyumi disamping tentara Hizbullah dan PETA. Perubahan sikap Jepang tersebut didorong oleh keinginannya untuk memanfaatkan kekuatan umat Islam dalam melawan penjajah Belanda dengan disertai janji-janji Indonesia merdeka dibawah asuhan saudara tua dalam peta Asia Timur Raya (Jepang).<sup>29</sup>

Pada masa pembentukan negara Republik Indonesia sebagian dari umat Islam menginginkan agar Indonesia didirikan sebagai negara Islam, sedangkan di pihak golongan kebangsaan menginginkan negara persatuan nasional yang memisahkan antara urusan negara dan urusan Islam.<sup>30</sup> Dan yang terjadi adalah terbentuknya negara yang bukan negara Islam. Para politisi baik Islam maupun yang lain bersepakat untuk mendasarkan negara Indonesia dengan dasar Pancasila.

Setelah kemerdekaan RI Masyumi merupakan kekuatan gabungan dari seluruh umat Islam yang terdiri

---

<sup>28</sup>Choirul Anam, *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdhatul Ulama*, Jatayu, Sala, 1985, 113.

<sup>29</sup>Abdul Munir Mulkhan, *Perubahan Perilaku Politik Dan Polarisasi Umat Islam tahun 1965-1987*, Rajawali, Jakarta, hal.45-46.

<sup>30</sup>H. Endang S. Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Pustaka Budaya, Jakarta, hal.25.



















sasi-organisasi tersebut ke dalam dua kelompok yaitu : organisasi-organisasi politik dan non politik. Untuk organisasi non politik, atas dasar kecenderu-ngannya dalam meyakini ajaran Islam, terdapat dua kelompok yaitu : kelompok tradisional dan modernis. Secara umum kelompok tradisional meyakini bahwa ummat Islam dalam menjalankan syarak harus berpegang pada suatu madzhab, sedangkan kelompok modernis anti madzhab.

Pada masa pembaharuan atau yang oleh Kuntowijoyo dalam periodesasinya dinamakan periode ideologi ini, politik mulai mempunyai nilai-nilai sosial keagamaan sehingga masarakat Islam di Indonesia mendirikan partai politik yang berkonotasi agama. Berpolitik karena didorong oleh agama, agama menjadi landasan, tujuan dan cita-cita politiknya.

SI yang merupakan salah satu faktor sosial intern Indonesia yang menyebabkan kemunculannya adalah bahwa di Indonesia terjadi perubahan status sosial bagi ummat Islam di Indonesia. Saat itu bermunculan kelas-kelas baru yang barangkali disebut kelas menengah, yang terdiri dari kelas pedagang, kelas buruh, dan belakangan kelas petani. Sebelumnya ummat Islam merasa dirinya sebagai *kawula* (abdi), yang kemudian berubah menjadi *wong cilik* (orang





























































maka para pembaharu membawa nilai-nilai sosial keagamaan baru ke dalam ummat Islam di Indonesia. Nilai-nilai baru itu dimasukkan terutama guna membersihkan Islam dari campuran-campuran kebiasaan dan kepercayaan yang menyimpang, yang tersimpul dalam istilah : tahayyul, Bid'ah dan Churafat. Perkembangan selanjutnya para pembaharu ingin melembagakan nilai-nilai baru mengenai masalah *furu'* yang lazim disebut masalah *khilafiyah*. Mereka ingin mengganti nilai-nilai yang terumuskan dalam sistem madzhab fiqh Syafi'iyah yang telah melembaga dalam masarakat Islam di Indonesia.

Syaikh Ahmad Soorkati telah memasukkan nilai sosial keagamaan *Musawa (asas persamaan) di antara sesama manusia*. Pada awal berdirinya Al Irsyad, nilai tersebut melembaga di kalangan Islam Arab terutama golongan Bukan Alawiyah .

Selanjutnya Soorkati dan kelompok-kelompok pembaharuannya disebut kelompok Modernis. Sebutan ini sesuai dengan usahanya yaitu *memodernkan ummat Islam dalam memahami ajaran Islam*.

Supaya kita ketahui ke mana arah pembaharuan keagamaan Islam yang dilakukannya, kita ketahui dulu arti dari proses pembaharuan yang disebut modernisasi tersebut. Modernisasi berarti "...proses perombakan pola berfikir dan tata kerja lama yang tidak akliyah













